

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR**

**NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**(Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa )**



**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Mataram Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi pemerintahan**

**Oleh :**

**NITA PUSPITA**

**216130060**

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**“PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018”  
(Studi kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa )**



Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan dan diajukan kepanitia Ujian

Skripsi Program Studi Pemerintahan

**Tanggal, 01 Februari 2020**

**Dosen Pembimbing I,**

**Drs. H. Darmansyah., M.Si**  
NIDN 0008075914

**Dosen Pembimbing II,**

**Iskandar, S.Sos., M.A**  
NIDN 0802048904

**Menyetujui:**

**Program Studi :Studi Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Ketua Program Studi,**

**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN: 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

(STUDI KASUS DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG  
KABUPATEN SUMBAWA )



Disusun dan diajukan oleh

**NITA PUSPITA**  
**NIM 216130060**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi Pada tanggal 10 february 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Tim Penguji**

- |   |      |  |
|---|------|--|
| 1. <b><u>Drs. H. Darmasyah, M.Si</u></b><br>NIDN.0008075914 | (PU) |  |
| 2. <b><u>Iskandar, S.Sos., M.A</u></b><br>NIDN.0802048904   | (PP) |  |
| 3. <b><u>Drs. Amil, M.M</u></b><br>NIDN.0831126204          | (PN) |  |

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

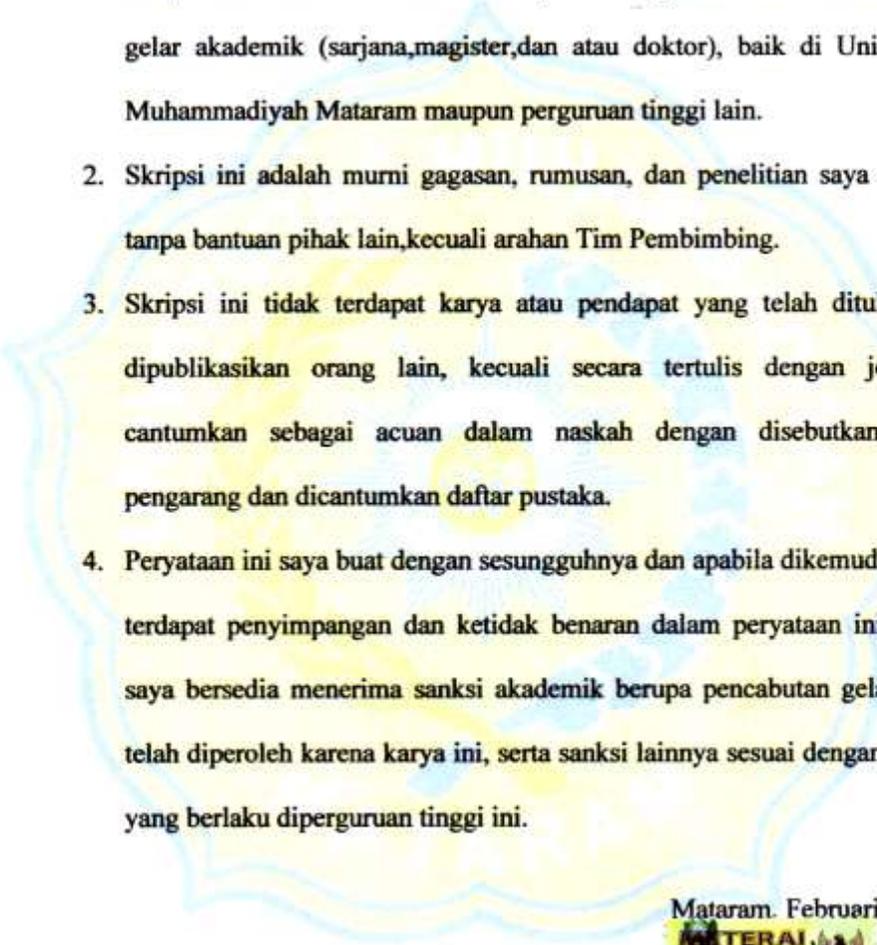
  
**Drs. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Mataram, Februari 2020

  
  
**NITA PUSPITA**  
**NIM :216130060**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Puspita  
 NIM : 216130060  
 Tempat/Tgl Lahir : Piampang, 09 April 1998  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp/Email : 085 239 904 908  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi politik perempuan pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Piampang Kecamatan Piampang Kabupaten Sumbawa)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20 Februari 2020

Penulis

NIM 216130060

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

**Pandangilah orang tuamu maka kebahagiaan akan menghampirimu (Dimana ada kemauan pasti ada jalan) orang yang tidak pernah bermimpi ialah orang yang tidak akan mendapatkan mimpinya menjadi kenyataan.**

**“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.**

**Kesuksesan tidak akan pernah datang dengan sendirinya tanpa ada pengorbanan, kerja keras dan doa .**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil perjuangan yang cukup melelahkan, teriring oleh waktu, kesabaran, ketekunan, dan doa serta wujud kasih sayang yang tak terkira, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt yang Maha Memberi Nikmat tanpa batas dan tauladan terhebat •

Nabi Muhammad SAW yang merupakan Murobbi terbesar dalam hidupku.

- Rasa hormat, sayang dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda (H.JABIR HB) dan ibunda (ZUHRA) yang tidak pernah merasa lelah memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dorongan semangat, materi, support dan bimbingan untukku.
- Kakakku Lina Purwati S.Pt, Linda Anggraeni Amd.Kep, yang sudah memberikan dorongan serta motivasi dan adikku Siti Hadija selama ini sudah menjadi penyemangat dalam penyelesaian tugas akhir,
- Sahabat terbaikku: Novita Sari, Tuti Apriliani, Jupriansyah, dan teman-teman dekat.
- Sahabat seperjuangan: Melda Oktaviana, Linda Rostayanti, Nurul Hidayah, Mariani, Cahyani Hariyanti, Nurnoviana
- Dan teman seperjuangan kelas IP B Ilmu pemerintahan 2016 yang selalu saling merangkul satu sama lain.
- Grup KKN : Septiadi, Hendra Wijaya, Sarwan Hamid, Mega, Akbar, Sulas, Linda, Ramlah dan Andri
- Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tetangga kost saya yang selama ini udah menjadi keluarga saya selama dalam perantaun.

Almamater Hijau mudaku tercinta dan kampus UMMAT Mataram

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**(Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan**

**Plampang Kabupaten Sumbawa)**

**NITA PUSPITA**

**NIM 216130060**

**ABSTRAK**

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan kedalam simbol-simbol pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik perempuan pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Penelitian ini dilakukan di desa Plampang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Desa Plampang cukup tinggi berdasarkan hasil rekapitulasi akhir desa Plampang. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur tahun 2018 adalah rasa ingin tahu dari masyarakat, terutama perempuan, untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam proses pemilu.

Kata kunci: partisipasi politik, perempuan, pemilihan gubernur

**POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN ON THE ELECTION OF WEST  
NUSA TENGGARA GOVERNOR IN 2018  
(A Case Study in Plampang Village, Sumbawa)**

**NITA PUSPITA**

**NIM : 216130060**

**ABSTRACT**

Political participation is essentially a measure to determine the quality of the ability of citizens in interpreting a number of symbols of power into personal symbols. This study aims to describe the political participation of women in the election of the Governor of West Nusa Tenggara in 2018. This research method is descriptive. Data collection uses interviews. This research was conducted in the village of Plampang.

The results of this study indicate that the level of political participation of women in the elections of West Nusa Tenggara in 2018 in Plampang Village is quite high based on the final recapitulation results in Plampang village. The factor influencing the level of participation in the 2018 governor election is the curiosity of the public, especially women, to take part in the democratic party and want to feel directly their involvement in the election process.

**Keywords:** political participation, women, governor election

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang segala tumpuan harapan yang peneliti harapkan, sebab semata-mata karena karunia-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, sebagai figure sentral segala tindakan manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya di muka bumi ini.

Selanjutnya dalam usaha penyusunan skripsi ini sudah tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan doa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung sangat kami syukuri. Lewat kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr.H.Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayatullah Hadi,S.IP,M.IP selaku Ketua Program Studi iIlmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Drs.H.Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini banyak memberikan motivasi dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya yaitu Skripsi.

5. Iskandar, S.Sos,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta ilmunya kepada saya dalam setiap bimbingan serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan Skripsi saya.
6. Dan tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada semua pegawai TU Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam proses pelayanan administasi.

Harapan peneliti semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Amin

Mataram,01 Februari 2020

Peneliti

**NITA PUSPITA**  
**NIM:216130060**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSTUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. PenelitianTerdahulu.....	10
2.2 Partisipasi Politik.....	18
2.2.1Sifat-Sifat Partisipasi Politik.....	28
2.2.2Tipologi Partisipasi Politik.....	29
2.2.3Bentuk Bentuk Partisipasi Politik .....	30

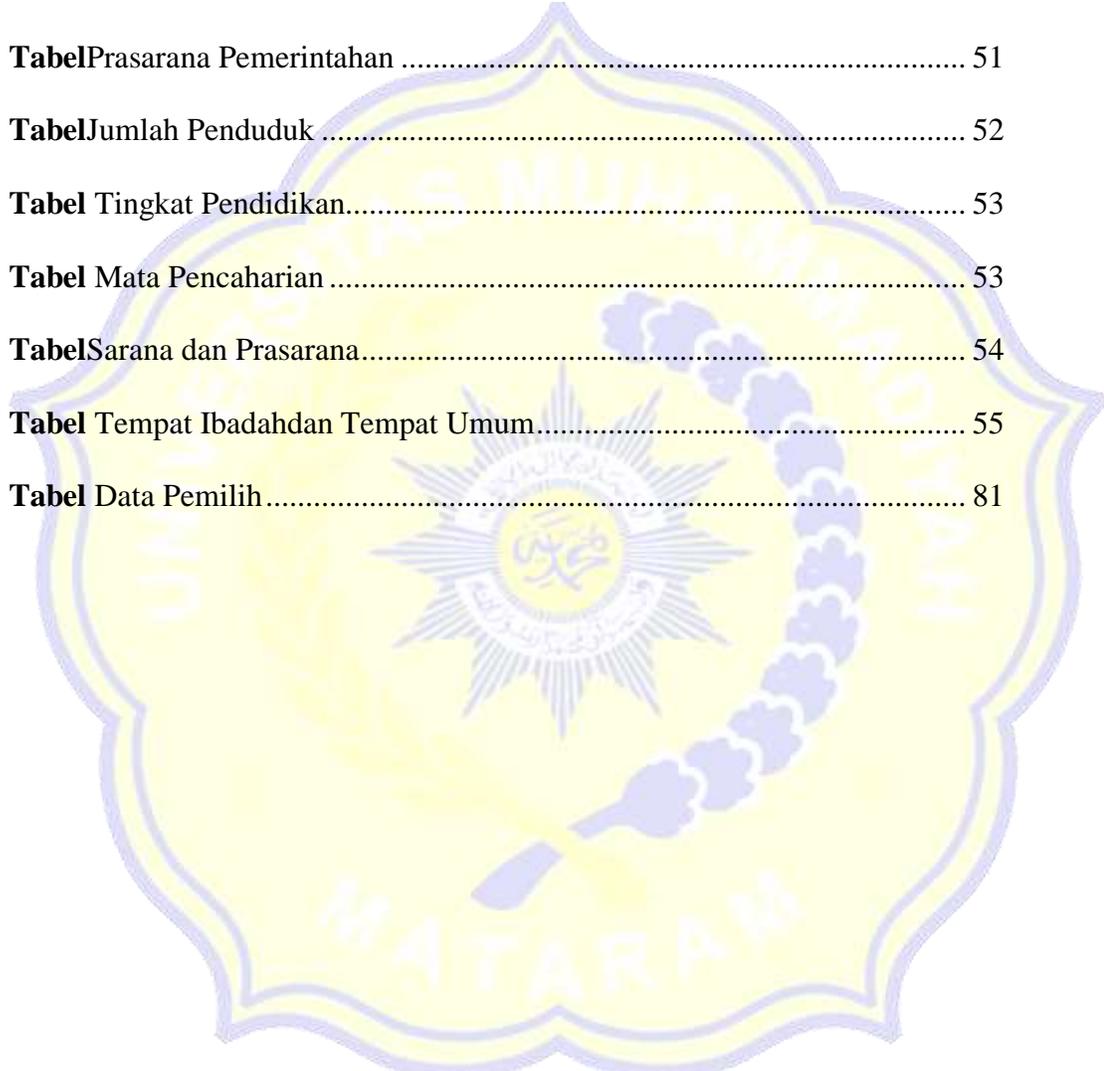
2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik .....	31
2.2.5 Partisipasi Politik Perempuan .....	35
2.3 Pemilihan Umum .....	38
2.3.1 Pemilihan Kepala Daerah .....	41
2.4 Masyarakat Politik .....	41
2.5 Tinjauan Gender Atau Perempuan .....	43
2.6 Pemilih .....	45
2.6.1. Jenis-jenis Pemilih .....	45
2.6.2. Pemilih Perempuan .....	47
2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perempuan .....	48
2.7 Pendidikan Politik .....	49
2.8 Kerangka Berpikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1. Metode Penelitian .....	53
3.2 Lokasi Penelitian .....	54
3.3 Informan Penelitian .....	54
3.4 Sumber Data .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5.1 Pengamatan .....	57
3.5.2 Interview ( Wawancara) .....	58
3.5.3 Studi Dokumentasi .....	58
3.6 Teknik Analisis Data .....	59

3.6.1 Reduksi data .....	60
3.6.2 Penyajian data .....	60
3.6.3 Penarikan kesimpulan .....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
4.2 Hasil Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.....	76
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Desa Plampang.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
5.1 Kesimpulan .....	101
5.2. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b> Penelitian Terdahulu.....	14
<b>Tabel</b> Pendidikan.....	50
<b>Tabel</b> Prasarana Pemerintahan .....	51
<b>Tabel</b> Jumlah Penduduk.....	52
<b>Tabel</b> Tingkat Pendidikan.....	53
<b>Tabel</b> Mata Pencaharian .....	53
<b>Tabel</b> Sarana dan Prasarana.....	54
<b>Tabel</b> Tempat Ibadahdan Tempat Umum.....	55
<b>Tabel</b> Data Pemilih.....	81





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b> Kerangka Berpikir Penelitian .....	36
<b>Gambar</b> Struktur Organisasi .....	56



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, akan tetapi pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu (Miriam: 2008:15)

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilihan umum secara konseptual dipandang mampu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang, telah mengalahkan popularitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Dengan demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka hal ini patut untuk dikawal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara yang dimiliki memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri (Cholisin,2007:70).

Bertitik tolak dari pengalaman Pemilu Nasional Indonesia sejak pemilu 1999 hingga 2009 terjadi penurunan partisipasi pemilih cukup signifikan. Tingkat partisipasi terus menurun dari 92% pada pemilu 1999 menjadi 84 % di 2004, dan terus menurun saat penyelenggaraan pemilu 2009, yakni tinggal 71%. Secara konsisten rata-rata penurunan dari tiga periode pemilu tersebut sebesar + 10 %.Tentunya ini merupakan tugas KPU untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak terjadi golput (golongan putih) yang cukup tinggi. Meskipun kecenderungannya menurun, namun KPU Pusat memiliki target tinggi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 hingga 75%. Target ini merupakan bagian dari sikap serta komitmen penyelenggara-ra pemilu untuk menguatkan legitimasi penyelenggaraan pemilu, meskipun hal itu dirasa cukup berat (Lutfi, 2014: 3).

Selain itu menurunnya angka partisipasi politik masyarakat dapat disimak dari pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa di Pemilu 2004 dengan jumlah pemilih 148 juta, dan mereka yang golput mencapai 23,34%, dan Pemilu 2009 dengan jumlah pemilih mencapai 171,2 juta, dan mereka yang golput mencapai 43%. Gamawan yang juga mantan gubernur Sumatera Barat ini juga mengutip hasil survei dari lembaga survei, tentang minat masyarakat dalam mengikuti Pemilu Legislatif 2014 yakni, tingkat keberminatan mencapai 79%, dan yang tidak berminat mencapai 16%, dan mereka yang menyatakan tidak tahu mencapai 5%. (Poskotanews, 2014). Selanjutnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan 60% responden survei yang dilakukan lembaga itu di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik (Republika, 2013:23)

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitive gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan. Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut.

### Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Umum

(pemilu) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan pada partisipasi politik bisa diwujudkan.

Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik. Hal ini diatur dalam undang-undang partai politik dan setiap partai politik wajib untuk mengikutinya sebagai bagian dari upaya keberpihakan kepada perempuan dan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi politik. Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik terutama dalam partisipasi pemilihan umum. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. Banyak perempuan Indonesia tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini. Selain itu, mereka pun tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih bungkam soal pemilu atau pun politik. Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislatif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak bisa terlibat dalam pembuatan legislaif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak

terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik ( keterlibatan dalam parlemen),

“Pemilihan Gubernur” diartikan sebagai pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah pemilu putaran pertama dilakukan pada tanggal 4 september 2013 dan putaran keduanya pada tanggal 27 November 2013, yang mana itu merupakan salah satu pesta demokrasi diatur dalam Undang-undang ( UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32/2004, dan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka 1 PP No. 6/ 2005, menjelaskan : “ Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/ kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, yang telah dirubah dengan PP No. 49/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6/2005.

Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Fungsi pengawasan terhadap pemilu perlu juga dilakukan oleh masyarakat untuk terwujudnya pemilu yang bersih dan berkualitas. Peran dan partisipasi masyarakat

sangat dibutuhkan untuk memudahkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan proses pemilu, sebab fungsi Badan Pengawas Pemilu tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi penuh masyarakat didalamnya. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan sebagainya. (Miriam: 2008:13).

Begitu juga di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. Di Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan memiliki 11 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Plampang Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Plampang untuk Pemilihan Gubernur NTB 2018, mencapai 21.113 orang. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilaksanakan 27 Juni 2018 tercatat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 15.887 orang. Artinya terdapat 5.226 orang yang golput alias tidak memilih. “Partisipasi pemilih di Plampang pada Pilgub mencapai 75,247 persen. Padahal sosialisasi intensif dilakukan baik oleh PPK sendiri maupun para komisioner KPU Kabupaten. Ada beberapa desa di Kecamatan Plampang yang partisipasi pemilihnya

cukup tinggi. Adalah Desa Usar, Desa Sepakat, Desa Selanteh, Desa Brang Kolong dan Desa Teluk Santong. Sedangkan Desa Plampang dari 3.416 yang tercatat di DPT, pemilih perempuan 1.363 pemilih laki-laki 1.299 total 2.662 (Samawarea:2018:2)

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, Perempuan di Desa Plampang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut hasil Observasi awal peneliti dari salah satu tokoh masyarakat menurut masyarakat yang menilai pilgub tidak terlalu punya dampak ke kehidupan terutama Perempuan, banyak dari mereka pun bersifat apatis dan minim tentang pendidikan politik sehingga lebih memilih memanfaatkan waktu pemugutan suara untuk berlibur atau dirumah mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang ketempat pemungutan suara (TPS). Perbedaan Pemilih Laki-laki dan Perempuan tidak ada bedanya perbedaannya karena mereka mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pilihannya sedangkan laki-laki lebih aktif dari perempuan karena mereka menganggap bahwa perempuan lebih baik di belakang laki-laki, sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi politik Perempuan di Desa Plampang Kecamatan Plampang pada pemilihan Gubernur 2018. Hal ini disebabkan karena Perempuan di Desa Plampang, Perempuan lebih memilih di rumah dan

mengerjakan pekerjaan rumah dari pada ikut terlibat dalam pemilihan, dalam hal ini menyebabkan kurangnya minat pada masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan Gubernur. Banyak warga Desa Plampang yang beranggapan ikut atau tidak ikut dalam berpartisipasi politik yaitu mencoblos pada pemilihan Gubernur tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga.

Berdasarkan Latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018”**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi politik Perempuan di Desa Plampang Kecamatan Plampang pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik Perempuan di Desa Plampang dalam pemberian suara pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik Perempuan di Desa Plampang pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik Perempuan Desa Plampang dalam pemberian suara pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis
2. Dapatkan selama dalam masa perkuliahan.
3. Berfungsi sebagai referensi tambahan bagi Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan sebagai aplikasi teori perwakilan politik.
4. Memberikan bahan masukan kepada pengambil kebijakan Pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan partisipasi Perempuan pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti - peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri., M.Si & Alona Dwinata., M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015 yang berjudul “ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015” hasil penelitian pada judul di atas ialah Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di

Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingginya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan tanjungpinang kota.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Wisnu Dani Prasetyo, Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Univet Bantara Sukoharjo, 2019 yang berjudul “ PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA” hasil penelitian pada judul di atas ialah 1) bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dikategorikan tinggi, hal ini karena pemilih pemula sangat antusias dalam memberikan hak suaranya. 2) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman beorganisasi, modernisasi. 3) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, *lobby*, kegiatan organisasi, *contacting*, tindakan kekerasan.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Susanti, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosiologi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang berjudul "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH RIAU TAHUN 2013 (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATANG SEROSA KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)"

Dari hasil penelitian pada judul diatas ialah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa, Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan pengambilan data perempuan yang terdaftar di DPT di Kelurahan Batang Serosa, untuk mengetahui secara jelas faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Batang Serosa tersebut. Untuk mengumpulkan data dari responden digunakan metode observasi langsung, wawancara, dokumentasi, kuisioner dan untuk pengelolaan data digunakan metode kuantitatif deskriptif. Pemerintah juga sudah berusaha dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam segala hal terutama dalam menggunakan hak suaranya atau pencoblosan suara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perempuan-perempuan di Kelurahan Batang Serosa dalam partisipasi politiknya sangatlah kurang berpartisipasi politik khususnya saat menggunakan hak suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerahnya disebabkan oleh

berbagai macam faktor terutama KPUD Kecamatan Mandau Kurang mensosialisasikan tata cara dalam pemilihan kepala daerahnya. Sehingga membuat perempuan terhambat dan tidak mengetahui tata cara dalam menggunakan hak suaranya yang benar.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Tia Subekti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, yang berjudul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) Dari hasil penelitian pada judul diatas ialah Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umumkhususnya melihat *turn of voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013?.*Kedua*,bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013? Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik. *Kedua*, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan

partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat



No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Critical Point
1.	Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri., M.Si 2015	Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	Lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012	Di dalam penelitian ini harus lebih mengutamakan dan melihat kepada aspirasi rakyat agar partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi lebih tinggi dan paham terhadap politik
2	Wisnu Dani Prasetyo (2019)	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (2019)	Pendekatan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1) bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dikategorikan tinggi, hal ini karena pemilih pemula sangat antusias dalam memberikan hak suaranya. 2) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman beorganisasi, modernisasi. 3) partisipasi politik pemilih pemula di	Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang aktif dalam memberikan hak suara mereka kepada pemimpinnya, guna tercapainya pembangunan daerah yang akan di capai.

				Kelurahan Sumber dipengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, <i>lobby</i> , kegiatan organisasi, <i>contacting</i> , tindakan kekerasan.	
3.	Susanti (2013)	Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa, Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerahnya disebabkan oleh berbagai macam - faktor terutama KPUD Kecamatan Mandau Kurang mensosialisasikan tata cara dalam pemilihan kepala daerahnya Sehingga membuat perempuan terhambat dan tidak mengetahui tata cara dalam menggunakan hak suaranya yang benar.

4.	Tia Subekti (2013)	Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi <i>Turn Of Voter</i> Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)	Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	penelitian pada judul diatas ialah Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat <i>turn of voter</i> dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013.Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat.	Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah - satu motivasi dalam partisipasi politik.Namun-sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat
----	--------------------	--	--	---	---



## 2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Budiardjo (2008: 367)

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik :

- Konvensional
  - Pemberian suara (voting)
  - Diskusi politik Kegiatan kampanye
  - Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

- Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

➤ Non-Konvensional

- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- Tindak kekerasan politik terhadap harta benda(perusakan, pengeboman, pembakaran)
- Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- Perang gerilya dan revolusi

Jadi partisipasi politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu konsep partisipasi politik masyarakat untuk memberikan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur NTB di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. (poska, 2014: 6)

Politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara.Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen).

Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan, 2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed dan Collin MacAndrews dalam Wisnu Dani Prasetyo (2011:56-57), sebagai berikut :

- a. Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Rahardjo dalam Mardijono mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain. (Rahardjo dalam Mardijono, 2008:134)

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :

- a. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Dengan berpedoman pada pendapat Daves dalam Ndraha (2006:34) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu :

- a. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- b. Kesiediaan untuk memberi kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, jasa, uang dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
- c. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok.

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

( Rahman,2007: 288)

Membedakan Partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni : Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses

politik. Partisipasi politik spektor orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. (Dadang, 2007: 134)

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152)

Sedangkan partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif.

Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas. Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289)

Merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat merupakan suatu akibat dari kegiatan politik

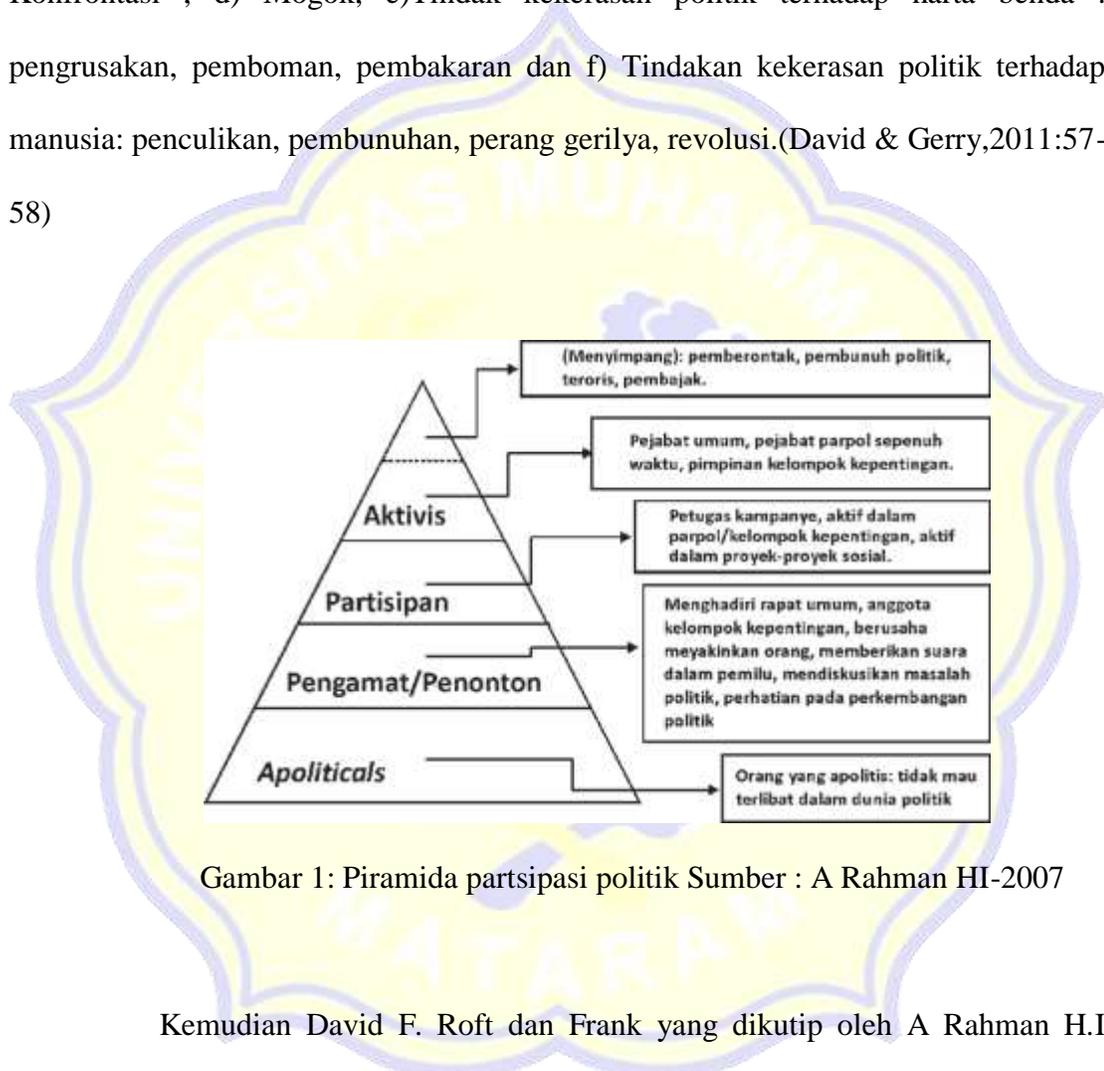
dan tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan tingkat partisipasi politik masyarakat didukung oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor kesadaran politik. Melalui kesadaran politik, masyarakat akan dapat bergerak menentukan bagaimana dengan cara apa ia akan berpartisipasi sehingga partisipasinya memberikan kontribusi yang produktif bagi proses politik yang sedang bergulir (Ruslan, 2007 : 46).

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Paige dalam Cholisin (2007:153)

Bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional: 1. Partisipasi politik konvensional mencakup: a) Pemberian suara atau voting , b) Diskusi politik ,

c) Kegiatan kampanye , d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan  
 e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif 2. Partisipasi politik nonkonvensional mencakup: a) Pengajuan petisi , b) Berdemonstrasi , c) Konfrontasi , d) Mogok, e)Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran dan f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.(David & Gerry,2011:57-58)



Gambar 1: Piramida partisipasi politik Sumber : A Rahman HI-2007

Kemudian David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I (2007: 286) bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan

intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson (A Rahman H.I, 2007:287) disebut sebagai kelompok apolitis.

Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan. (A Rahman H.I, 2007:287)

Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi pilbup yaitu bergabung dengan salah satu parpol di daerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik di daerahnya. Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai

pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik. David & Gerry,2011:30)

### **2.2.1 Sifat-Sifat Partisipasi Politik**

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

- a. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
- b. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang di mobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga. Budiardjo (2008:370)

## 2.2.2 Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum menurut A.Rahman (2007 : 288) tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- a. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Adapun menurut Eep Saefullah Fatah (A.Rahman,2007:127) ada beberapa sebab orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah :

- a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis tertentu ( seperti keluarga meninggal.ketiduran,dan lain-lain) berhalangan hadir ditempat pemungutan suara karena sakit, keluar kota, bekerja, dan cuaca buruk.
- b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, serta tidak ada sosialisasi tentang visi dan misi kandidat sehingga pemilih tidak memahami isi,visi dan misi kandidat.

- c. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu), tidak mendapat undangan, tidak ada sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu, dan tidak tahu jika dapat menggunakan KTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

### 2.2.3 Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Dusseldorp dalam Miriam Budiardjo, (2008: 370), salah satu cara untuk mengentahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk - bentuk keterlibatan seseorang sebagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalan *public policy*. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kefasipan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Gabriel A. Almond dalam Rahman (2007:211) membedakan partisipasi politik masyarakat dalam dua bentuk yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional, sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik masyarakat yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Sementara itu Maribath dan Goel dalam Rahman (2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d. Pengritik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

#### **2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik**

Menurut Ramlan Surbakti (2006:144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.

b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu pada adapun tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:

a. Tahapan Persiapan

b. Tahapan Pelaksanaan

c. Tahapan Penyelesaian

Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasanya di gunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. (Mariam, 2008:134)

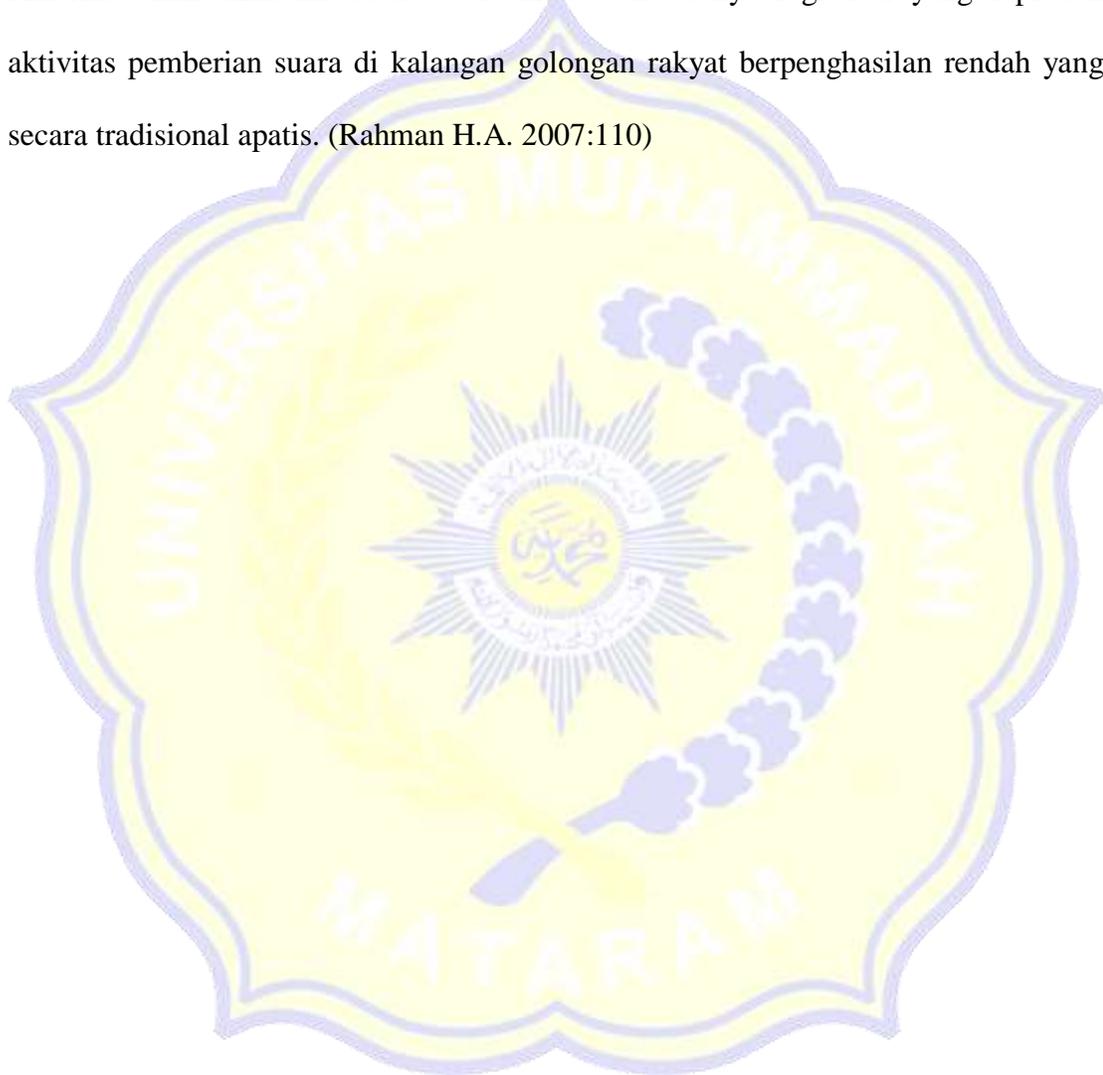
Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup kesegala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas

partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisirakan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.(Rizal Andreeyan.2007:50)

Disamping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik misalnya laki-laki lebih aktif dari pada wanita; orang yang berstatus sosial lebih tinggi lebih aktif dari pada yang berstatus lebih rendah. Juga banyak bukti yang mengungkapkan bahwa *partai politik* berpengaruh besar dalam partisipasi politik rakyat. Di Amerika Serikat, orang yang berpartai lebih besar sering memberikan suara dari pada yang tidak berpartai; orang yang setia kepada partainya lebih aktif lagi. Orang-orang yang berstatus rendah di negeri itu belum banyak di bantu oleh organisasi politik. Partai-partai buruh di Eropa telah bekerja keras untuk menarik golongan masyarakat berstatus rendah, sehingga golongan ini mempunyai dukungan organisasi bagi tuntutan-tuntutannya dan terdorong untuk berpartisipasi politik. Di Inggris buruh tidak terpelajar sering jauh lebih aktif dari rekan-rekan mereka di Amerika Serikat, ini terutama karena perjuangan gigih serikat buruh dan partai buruh untuk menggerakkan mereka. (Suharyanto, 2014: 16-18).

Apakah aktivitas kampanye mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan kaum pemilih (*electorate*) untuk berpartisipasi politik tidaklah begitu

jelas. Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Tetapi meningkat jumlah pemberi suara secara dramatis di negara-negara bagian selatan Amerika akhir-akhir ini betul-betul akibat dari adanya registrasi yang rapi dan aktivitas pemberian suara di kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional apatis. (Rahman H.A. 2007:110)



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi politik adalah :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Jenis kelamin
- c. Status sosial ekonomi seseorang
- d. Peran partai politik
- e. Aktivitas kampanye
- f. Calon-calon/tokoh politik yang memiliki daya tarik pribadi kuat (kharismatis).

### **2.2.5 Partisipasi Politik Perempuan**

Pengertian Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah Subhan (2006:19) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang di nafsu atau merupakan objek seks.

Partisipasi politik perempuan bisa berbentuk konvensional dan bisa juga non-konvensional. Hanya memang kemudian partisipasi perempuan ini dipengaruhi oleh peluang resmi, apakah perempuan diberikan kesempatan untuk berada di wilayah politik tersebut, sumber daya sosial yang berarti apakah mereka memiliki

kemampuan untuk terjun ke wilayah tersebut dan dan motivasi personal atau kemauan dari perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Milbarth terdiri dari: (1) *apatis*, yaitu tidak aktif, dan menarik diri dari proses politik; (2) *spectator*, yaitu pernah memilih dalam pemilihan umum; (3) *gladiator*, yaitu terlibat dalam proses politik; dan (4) *pengeritik*, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional. Sedangkan menurut Olsen dalam Surbahdi (2007: 143) partisipasi politik termasuk di dalamnya perempuan yaitu: (1) pemimpin politik; (2) aktivis politik; (3) komunikator; (4) warga Negara biasa; (5) marginal; dan (6) orang yang terisolasi.

Melihat tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, mengikuti pembagian Paige, partisipasi politik perempuan bisa dibagi kedalam empat tipe, yaitu:

1. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik, dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi;
2. Apatis (pasif-tertekan), yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.
3. Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah;
4. Pasif, yaitu apabila kesadaran politik rendah, dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi. Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi *partisipasi politik*. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri

seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang:

- Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
- Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, berjalannya pertumbuhan pembangunan social, ekonomi, dan politik di tingkat kehidupan local maupun nasional yang sudah pasti akan selalu memberikan suatu perubahan baik itu dalam konteks peningkatan segi pola fikir maupun pada segi kecakapan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Maka, dengan demikian secara tidak langsung akan serta merta menumbuhkan tingkat perubahan kinerja ataupun proses-proses terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat maupun yang akan diberlakukan didalam dinamika kehidupan masyarakat luas, terutama pada konteks kehidupan perempuan itu sendiri.

Faktor nilai budaya juga termasuk tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, nilai budaya yang dimaksud menyangkut persepsi, pengetahuan,

sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap politik sesuai teori suherizal, dalam buku : pemilukada : Regulasi, dinamika, dan konsep mendatang, 2011. Seperti kita ketahui di era modern ini, kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik sudah semakin menurun disebabkan berbagai macam hal. Terutama disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pemilih terhadap kandidat –kandidat yang akan mereka pilih dalam pemilukada maupun pemilu.

Persepsi perempuan terhadap politik sangat kurang diikuti dengan para pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaan dari pada kesejahteraan masyarakat. Banyaknya pemimpin yang terlibat dan tersangkut kasus korupsi dan tindakan kejahatan lainnya sudah menjadi nilai negative masyarakat terutama bagi perempuan terhadap pemerintahan. Pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat cenderung menyebabkan menurunnya minat partisipasi politik. Masyarakat dalam partisipasi ingin mendapatkan sosok pemimpin yang mampu membawa masyarakat kearah perubahan dari setiap sector yang lebih baik lagi bukanlah sebaliknya.

### **2.3 Pemilihan Umum**

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis,kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.  
(Haris,2006:10)

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Huntington dalam Rizkiyansyah (2007:3)

Sedangkan “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling *representatif* atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan

menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat,tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Guna penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum,Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota .Untuk lebih memahami konsep pemilihan umum, kita harus memahami tujuan, asas, dan sistem pemilihan umum ;

a. Tujuan pemilihan umum yaitu memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

b.Asas pemilihan umum. berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 Bab II pasal 2 : Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

a. Umumnya ada dua, system pemilihan umum yang dipakai :

a. System distrik: sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan.

b. System proposional yaitu system yang didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang) sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang

yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik yang dikenal lewat tanda gambar sehingga wakil dan pemilih kurang akrab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat. Rizkiyansyah (2007:34)

### **2.3.1 Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala daerah secara langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005, tepatnya pada bulan juni 2005. Pemilu pada merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang demokratis karena Pertama, metode ini mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyat di wilayahnya. Kedua, akan membantu rakyat membangun rasionalitas sebagai pemilih. Dengan kata lain akan mengerti pentingnya proses politik daerah, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga daerah untuk memilih tokoh politik yang handal, dan mengekspresikan kepentingan mereka sebagai warga daerah. Ketiga, pemerintah daerah akan lebih akuntabel kepada rakyat. Keempat, Pemerintah daerah akan memberikan pelayanan public sesuai dengan kepentingan warganya dan transparan dalam mempergunakan keuangan negara. Notrida dalam ardin, (2007: 123).

### **2.4 Masyarakat Politik**

Masyarakat politik ialah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Tugas yang diamanatkan pada negara bersifat menyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa

adanya dukungan yang positif serta partisipasi dan peran serta seluruh warga negara atau masyarakat, maka tugas yang diamanatkan pada negara tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Beginilah seharusnya hubungan negara dengan warga negara terjalin.

Masyarakat politik menjalankan fungsi sebagai kekuatan dan mempunyai kontrol dalam sosial politik yang memiliki pengertian berbeda, sementara masyarakat sipil merupakan wilayah persetujuan. Masyarakat politik memiliki peranan sebagai dominasi langsung (koersif) atau berada didalam kendali negara sektor dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Sektor negara (masyarakat politik), Lembaga negara dengan pilar utamanya seperti parlemen, pemerintah dan lembaga peradilan memiliki prinsip kekuasaan yang bersifat memaksa (*coercion*). Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan peraturan. Misalnya dalam hal pajak, putusan peradilan yang bersifat memaksa dan terikat, serta menjamin hak warga negara dalam hal kepastian hukum.
- b. Sektor pasar (*market sector*), salah satu pilar utama yang mengatur tentang pasar dan keuangan dalam hal ini perusahaan negara maupun swasta, termasuk lembaga keuangan (*bank*) yang memiliki mekanisme untuk menghasilkan dan memperoleh laba (*market mechanism for profit*). Baca juga: Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Sentral

- c. Sektor voluntir (*the third sector*). Lembaga swadaya masyarakat (*new social movement*) dalam perkembangannya memiliki nilai kesukarelaan (*voluntary*) yang tanpa mementingkan laba (*non profit*) dan tidak bersifat memaksa (*non coercive*)

Di dalam ilmu politik, masyarakat terdiri dari tiga karakter diantaranya:

- a. Masyarakat Kritis, merupakan masyarakat yang berani mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara. Berani mengemukakan pendapat serta melawan dominansi dalam suatu komunitas, baik dalam serikat, gerakan sosial maupun pemerintahan.
- b. Masyarakat Konservatif, merupakan masyarakat hanya menerima dan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan tidak berusaha mengubah apapun.
- c. Masyarakat Idealis, merupakan masyarakat yang memiliki cita-cita yang tinggi dan merasa mempunyai pengetahuan politik, hingga apapun kebijakan pemerintah selalu tidak pernah sesuai harapannya.

## **2.5 Tinjauan Gender atau Perempuan**

### **1. Teori Gender**

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi cara berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini karena dalam masyarakat berbagai akumulasi peran individu bertemu. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke

generasi berikutnya (Puspitawati, 2012:1). Sedangkan defenisi konsep gender menurut Mansour Fakih dalam Agustino (2007:229) adalah :

“Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari suatu klas ke klas yang lainnya”

Uraian teori gender berkenaan dengan efek perbedaan biologis terhadap peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Garis besarnya teori gender dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun. Aliran *nature* menggarisbawahi bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, sedangkan dalam aliran *nuture* menyatakan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh kontruksi masyarakat (Umar dalam Remiswal, 2013:12)

Teori gender (Millet dalam Remiswal, 2013:12) antara lain :

1. Teori Nature Melihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan biologis. Sisi biologis laki-laki memiliki tubuh lebih kuat dan kekar. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Masing-masing peran tidak dapat dipertukarkan laki-laki.

2. Teori Nurture Melihat bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestik serta urusan publik dan sebagainya, yang mana dapat dimainkan

secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengurustamaan gender kedalam seluruh pembangunan nasional. Selain itu, tidak terkecuali pula dalam proses pemilihan umum bahwa perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang wajib menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

## **2.6 Pemilih**

Defini pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Prihatmoko, 2006:46).

### **2.6.1 Jenis-jenis Pemilih**

Secara psikologis, untuk menganalisa rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (*similarity*) dan ketertarikan (*attraction*). Dasar penggunaan model tersebut karena setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama (Byrne dalam Puspitasari, 2012:17). Atas dasar model kesamaan dan kedekatan ideologi dan *problem-solving*, terdapat empat jenis pemilih (Firmanzah, 2009:99-109) antara lain yaitu :

1) Pemilih Rasional Pemilih jenis ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya. Program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

2) Pemilih Kritis Proses menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih kritis menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, juga dapat terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sesuatu kebijakan. Pemilih kritis ini adalah pemilih yang kritis, dengan artian mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

3) Pemilih Tradisional Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi.

4) Pemilih Skeptis Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

### **2.6.2 Pemilih Perempuan**

Pemilih Perempuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Pemilih perempuan masih erat dengan faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional dalam menjustifikasi pilihan politiknya jika ditinjau dari studi *voting behaviors*. Perbedaan yang membedakan pemilih perempuan dan kelompok lainnya adalah soal pemilihnya yang cenderung mudah terpengaruh oleh budaya patriarki, sifat apatis, dan sikap pragmatis dalam menghadapi pemilu.

Cara pandang perempuan tersebut selalu berkaitan dengan perempuan yang tidak ingin direpotkan dengan urusan yang mereka anggap bukan urusan mereka. Seperti penelitian Jannah (2012) yang menyebutkan bahwa pemilih perempuan cenderung terpengaruh oleh sikap pragmatisme dan apatis dalam berpolitik, menganggap pilihan politiknya tidak akan membawa dampak terhadap kehidupan. Selain itu, pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menentukan pilihan seperti adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada. Hal ini

terjadi karena budaya politik yang mereka miliki dan juga sikap pasrah terhadap afiliasi politik suami atau bapaknya serta rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

### **2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perempuan**

Pilihan Politik Perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti struktur sosial budaya dan juga sistem politik yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan antara lain :

1. Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang waktu. Proses sosialisasi masyarakat dapat memperoleh informasi, ide dan nilai-nilai yang menjadi pengetahuan dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau individu untuk menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya. Nilai yang berasal dari keluarga adalah nilai yang paling mempengaruhi persepsi perempuan terhadap fenomena politik

2. Kelompok sosial secara sosiologis, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik masyarakat. Proses sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya. Pemilih perempuan yang berada di dalam suatu

kelompok sosial tertentu akan menerima proses internalisasi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, perilakunya secara umum akan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang secara psikologis sangat mempengaruhi perempuan. Begitupun dengan pilihan politiknya yang secara psikologis akan berkaitan dengan preferensi anggota kelompoknya (Adman Nursal, 2004:60).

## **2.7 Pendidikan politik**

Menurut Djiwandono dalam Sumantri (2003: 23) bahwa Pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian budaya politik bangsa yang mencakup cita-cita politik dan norma-norma operasional dan sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila penting bagi seluruh rakyat, seluruh warga.

Pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang mana dilakukannya dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, kesadaran politik merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal tentang negara. Ramlan Surbakti (dalam Kharim, 2004: 109) mengemukakan bahwa politik adalah “hak dan kewajiban

sebagai warga negara menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik”.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

## **2.8 Kerangka Berfikir**

- a. Pengetahuan Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Gubernur 2018.

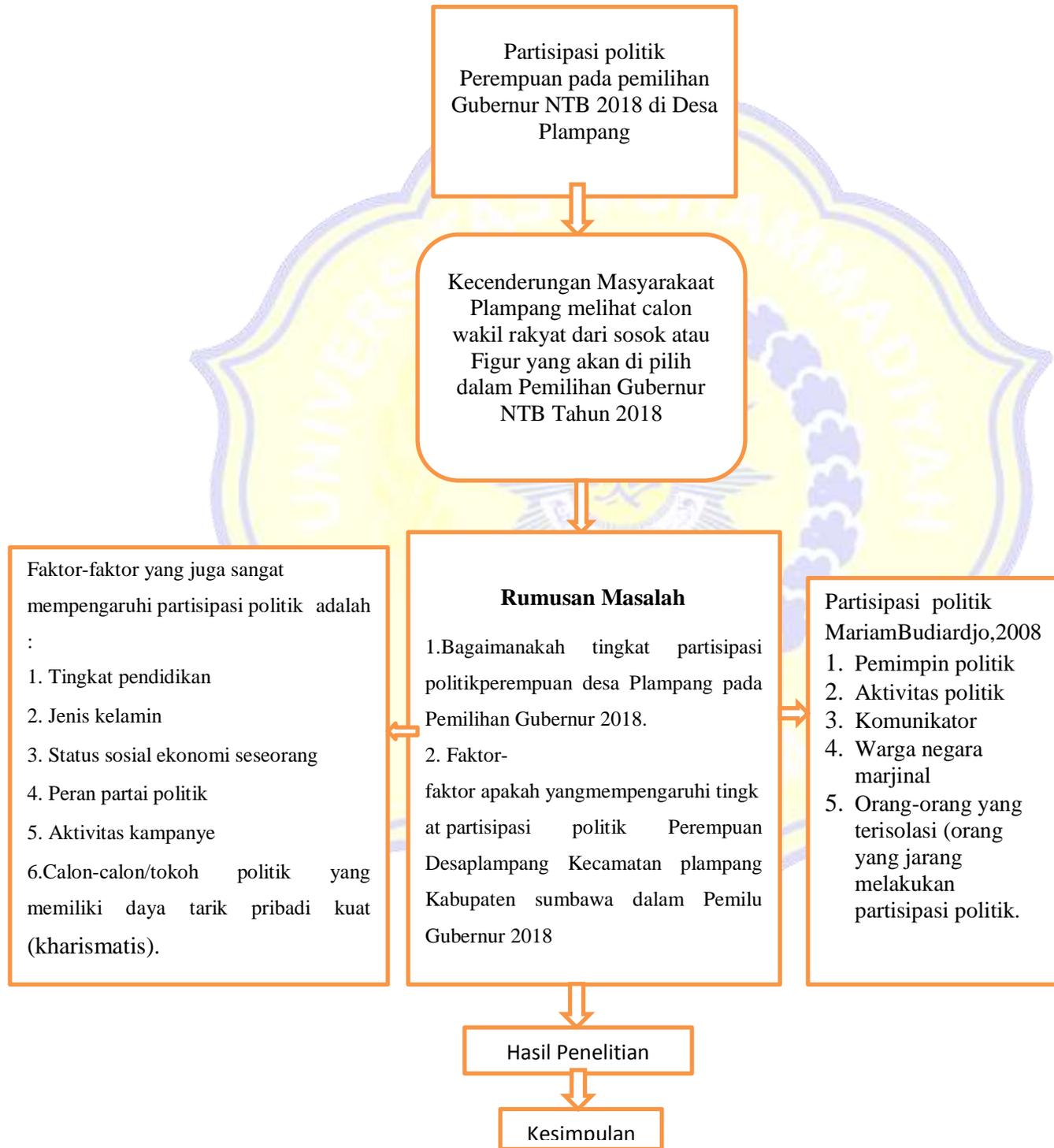
Penelitian ini dilakukan untuk mencari seberapa besar tingkat partisipasi politik Perempuan pada Pemilihan Gubernur, dimana pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang. Ketika seseorang memiliki kesadaran politik yang diperoleh dari pengetahuan politik sehingga mempengaruhi partisipasi politik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi Politik Perempuan Desa Plampang, pada Pemilihan Gubernur NTB tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari seberapa besar tingkat partisipasi politik terhadap perempuan, Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah salah satunya dapat diperoleh dari penilaian masyarakat terhadap aktor politik sehingga mampu mempengaruhi partisipasi politik perempuan yang dapat dilihat dari interaksi antara aktor politik dan masyarakat terutama perempuan itu sendiri, hubungan aktor politik dan masyarakat terhadap pesta demokrasi pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang tanggap dan mengerti situasi tentang hal yang mencakup mengenai politik, wawasan politik, orientasi politik yang memungkinkan seseorang tersebut memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan keputusan dan mendorong agar bergerak dalam pembangunan. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan politik dan partisipasi politik perempuan terhadap politik. Di sisi lain, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang diwakili oleh keberadaan aktor politik dapat mempengaruhi perempuan. Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat melalui gambar skema di bawah ini:

## Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyano, 2010 :50)

Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari konseptual yang operasionalkan, dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antarvariabel (Sugiyano, 2010:100)

Dalam penelitian ini, metode utamanya adalah dengan menggunakan survey yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada responden, sedangkan data yang di

peroleh dari indepth interview atau wawancara mendalam digunakan untuk menambah atau membumbui temuan data survey sehingga hasil yang ditemukan dari survey menjadi lebih jelas dan bermakna. Suyanto dalam sutina (2010:22)

Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis dan mengumpulkan data. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya akan dipaparkan data-data yang berkenan dengan partisipasi politik Perempuan pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018. (Suyanto, 2010:125)

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Sebelum menyusun melakukan penelitian memang melakukan berbagai pertimbangan baik pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya apa lokasi tersebut mendapat masalah yang banyak dikaji secara ilmiah serta obyek tersebut mudah dijangkau efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Untuk itu daerah penelitian yang ditetapkan adalah di Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

### **3.3. Informan Penelitian**

Informan merupakan sumber data untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Keberadaan informan disini tidak dimaksudkan untuk menganalisis penelitian secara keseluruhan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti memperoleh data secara mendalam

dari informan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitian berdasarkan fokus permasalahan dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak yang terlibat dalam penanganan pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Haris dalam Gibran (2010:50) Informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kades, Kepala Desa Plampang
- b. Staff Desa Plampang
- c. Ketua Pkk Desa Plampang
- d. Ketua Penyelenggara Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun tahun 2018
- e. Pemilih Perempuan (5 Orang )
- f. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa
- g. Staf Atau Komisioner KPU Sumbawa

#### **3.4 Sumber Data**

Menurut Bagong Suyanto dalam Sutinah,(2010:36) Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner menjawab dengan memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan.

- b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu tugas utama pada saat melaksanakan penelitian lapangan (Field Research) adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusun proposal ini. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penetapan pengumpulan data sangat penting sekali, disamping akan memudahkan penyusunnya dalam memasuki tahap dari pembahasannya, dan yang lebih utama lagi setiap peneliti atau penyusun adalah bagaimana memilih dan menggunakan metode yang relevan, mudah dan praktis. (Sugiyono, 2013:224)

Pengumpulan data pada dasarnya adalah merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Banyak masalah yang dirumuskan dan tidak akan biasa terpecahkan, karena metode untuk memperoleh data yang dipergunakan tidak memungkinkan ataupun data yang ada tidak akan menghasilkan data seperti yang diinginkan. (Idrus, 2007:35)

Dalam proposal ini penyusun menggunakan berbagai metode relevan dan fokus pembahasan yang ada, metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*) Metode ini adalah suatu metode untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk pembahasan skripsi yang akan disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian, dengan kata lain mencari data dan mencari bahan-bahan yang berupa bacaan dari kepustakaan.
2. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu mengadakan penelitian lapangan atau lokasi penelitian dengan mengadakan interview, observasi dan komunikasi dengan responden guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis dalam suatu karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya dalam melakukan pengumpulan data, penyusun menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu.

### **3.5.1 Pengamatan**

Menurut Sofyan Effendi dalam Singarimbun Masri (2014:50), Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan dan jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- b. Pengamatan harus berkaitan untuk penelitian dengan tujuan penelitian yang telah di rencanakan.
- c. Pengamatan tersebut dicatat sebagai sistematis dan dihubungkan dengan persepsi umum dan bukan dipaparkan sebagai set yang menarik perhatian saja.

d. Pengamatan dapat di cek dan dicontrol atas fasilitas dan mentalitasnya.

### **3.5.2 Interview ( Wawancara)**

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab atau responden. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk janta jawab sambal tatap muka, wawancara adalah proses pengumpulan data atau suatu penelitian. Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono,(2013:231)

### **3.5.3 Studi Dokumentasi**

Pengumpulan bahan melalui Study dokumentasi ini dimaksudkan sebagai salah satu sumber informasinya adalah mencari dan mendapatkan data dan bahan-bahan yang diperlukan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip kantor. Demikian Study Dokumentasi suatu upaya untuk mendapatkan bahan sumber utamanya, sehingga data masih disebut data primer. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Effendi Sofyan dalam Sugiyono (2013:240).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi, dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. ( Haris, 2010:100)

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses panafsiran data Moleong dalam Gaffar. ( 2006:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tida tahap, yaitu :

### **3.6.1 Reduksi Data**

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dalam Sutinah, (2010:70)

### **3.6.2 Penyajian Data**

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Arikanto dalam Suharsimi, (2006:90)

### **3.6.3 Penarikan Kesimpulan**

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil wawancara dan

dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

